

**STRATEGI BADAN PENGELOLA KEUANGAN DAERAH (BPKD)
DALAM MEMPERTAHANKAN OPINI WAJAR TANPA PENGECUALIAN
PADA MASA PANDEMI COVID-19
DI KABUPATEN ACEH SELATAN PROVINSI ACEH**

Cut Sarah Nadhilla
NPP. 29.0016

*Asdaf Kabupaten Aceh Selatan, Provinsi Aceh
Program Studi Keuangan Publik*

Email: ncutsarah@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The Regional Government Financial Reports (LKPD) of South Aceh Regency for 6 consecutive years have always received Unqualified Opinions (WTP) but errors are still found in the LHP. **Purpose:** This research was conducted to find out how the strategy to maintain the opinion of the WTP, the inhibiting factors and efforts to maintain the opinion of the WTP. **Method:** The research method used is descriptive qualitative with an inductive approach. Determination of the informants used is a purposive sampling technique. Then, data analysis was carried out through data reduction, data presentation and conclusion drawing. Data collection techniques were carried out by interview, observation, and documentation. **Result:** In addition, examples of inhibiting factors, namely the capability of human resources who understand accounting are very few and inadequate, the SPI environment is not adequate, the application of SIKD application is not sufficient, and asset administration is not optimal. **Conclusion:** The results of the research on the implementation of financial management in South Aceh Regency have not been carried out optimally. As for examples of factors supporting the implementation of financial management in the field, namely the commitment and cooperation of all stakeholders and the leadership of each OPD in the process of preparing financial reports and reports. One of the efforts made is to utilize the commitment of each OPD to be on time in collecting reports. The researcher suggests that the local government implement several things that are included in the effort to maintain the acquisition of WTP opinions in South Aceh Regency in the following years.*

Keywords: *Management, Financial Statements, Local Government, Opinion*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Kabupaten Aceh Selatan selama 6 tahun berturut-turut selalu memperoleh Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) namun masih ditemukan kesalahan yang tercantum dalam LHP. **Tujuan:** Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui bagaimana Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (Bpkd) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. **Metode:** Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif. Penentuan informan yang digunakan ialah teknik purposive sampling. Kemudian, analisis data dilakukan melalui reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan wawancara, observasi, dan dokumentasi. **Hasil/Temuan:** Faktor penghambat, yaitu kapabilitas SDM yang mengerti akuntansi sangat sedikit dan belum memadai, lingkungan SPI yang belum memadai, penerapan aplikasi SIKD belum memadai, serta penatausahaan aset yang belum optimal. **Kesimpulan:** Hasil penelitian diperoleh pelaksanaan pengelolaan keuangan di Kabupaten Aceh Selatan belum dilaksanakan secara maksimal. Adapun contoh faktor pendukung pelaksanaan pengelolaan keuangan dilapangan, yaitu adanya komitmen dan kerjasama seluruh *stakeholder* dan pimpinan masing-masing OPD dalam proses penyusunan dan penyerahan laporan keuangan. Salah satu upaya yang dilakukan yaitu mendayagunakan komitmen setiap OPD untuk tepat waktu dalam pengumpulan laporan. Peneliti menyarankan agar pemerintah daerah melaksanakan beberapa hal yang termasuk dalam upaya untuk mempertahankan perolehan opini WTP pada Kabupaten Aceh Selatan pada tahun-tahun selanjutnya.

Kata kunci: Pengelolaan, Laporan Keuangan, Pemerintah Daerah, Opini

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah, menjelaskan jika pemerintahan daerah merupakan penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah serta dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi serta tugas pembantuan dengan prinsip otonomi selebar-lebarnya pada sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Setiap daerah di Indonesia baik provinsi, kabupaten maupun kota dipimpin oleh kepala daerah sebagai pemimpin pemerintahan daerah. Kepala daerah adalah juga yang memimpin penyelenggaraan urusan pemerintahan yang memiliki kewenangan otonom. Sistem daerah otonomi setiap daerah wajib untuk menyusun APBD segimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 17 Tahun 2003 mengenai keuangan Negara. Dijelaskan lagi pada BAB IV tentang penyusunan dan penetapan APBD jika APBD dirancang tepat pada keperluan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.

Setelah proses penyusunan ini selesai hingga ditetapkannya APBD inioleh kepala daerah bersama DPRD maka hendaklah dapat dilaksanakan segala kegiatan yang telah direncanakan sebelumnya dengan efektif, tertib, transparan dan bertanggungjawab sehingga dapat memberi manfaat juga kepada masyarakat. Pertanggungjawaban atas APBD tersebut maka pemerintah daerah diharuskan untuk menyampaikan laporan pertanggungjawaban berupa Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). LKPD itu sendiri menyajikan laporan posisi keuangan serta transaksi-transaksi yang dijalankan dari sebuah entitas pelaporan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) melaksanakan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) untuk memberi keyakinan bahwa laporan keuangan daerah telah sesuai Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang sudah diatur pula dalam Peraturan Pemerintah nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Pemeriksaan BPK membuat kesimpulan atas laporan keuangan tersebut dalam bentuk opini. Opini dalam hal ini adalah pernyataan sebagai kesimpulan pengidentifikasi terkait tingkat kewajaran informasi yang disediakan pada laporan keuangan.

Penyusunan LKPD pemerintah daerah Aceh Selatan selalu berusaha untuk mewujudkan yang transparan dan akuntabel . Setelah diperiksa Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kembali mendapat Opini Wajar Tanpa Pengecualian selama 6 tahun berturut-turut dan itu dimulai sejak tahun 2015.

Tabel 1.

Opini BPK terhadap LKPD Kabupaten Aceh Selatan Tahun 2014-2020

No	LKPD (Tahun)	Opini
1	2	3
1	2014	WDP
2	2015	WTP
3	2016	WTP
4	2017	WTP
5	2018	WTP
6	2019	WTP

1	2	3	4
7	2020	WTP	7

Sumber : BPK RI Perwakilan Provinsi Aceh, 2021

Tabel 1 menunjukkan Opini BPK untuk seluruh Kabupaten/Kota di provinsi Aceh dan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Aceh Selatan banyak terlihat peraihan Opini WTP pada masing-masing tabel, ini tidak lepas dari usaha dan kerja keras serta komitmen seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Aceh khususnya Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan untuk menyusun laporan keuangan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan akuntabel sehingga mampu mempertahankan Opini WTP selama 6 tahun berturut-turut.

1.2 Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Ada beberapa permasalahan berkaitan dengan Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Pada masa pandemi covid ini terdapat dampak-dampak dalam proses penyelenggaraan pemerintah termasuk didalamnya proses pemeriksaan laporan keuangan pemerintah daerah. Dampak dari pandemi Covid-19 yang berakibat pada keuangan daerah, antara lain PAD menurun, kegiatan yang tidak termasuk dalam prioritas 10 dipangkas, resiko timbulnya hutang atas PBJ (Pengadaan Barang/Jasa) yang telah berjalan dan ditunda pembayarannya, upaya untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK terhambat (Pembatasan bepergian dan adanya kebijakan PSBB) dan sistem WFH (work from home) belum diadaptasi dengan baik oleh pemda. Tentu saja hal ini menjadi kendala dan hambatan yang sangat signifikan bagi Pemerintah Daerah dalam mempertahankan opini WTP terhadap LKPD ditahun berikutnya. Salah satu contoh dalam kasus dengan diberlakukannya sistem kerja WFH sudah sangat tentu membuat kinerja pegawai tidak seefektif biasanya, koordinasi antar pegawai pada bidang terkait juga akan menurun dan pengumpulan data pun menjadi kurang maksimal.

1.3 Penelitian Terdahulu

Penelitian ini terinspirasi oleh beberapa penelitian terdahulu, penelitian Jumariah yang berjudul Upaya Pemerintah Daerah Dalam Mencapai Opini WTP Pada Pemerintah Daerah Kabupaten Sidrap (Jumariah, 2018), menemukan bahwa upaya sebelum mendapat opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yaitu dengan membenahi seluruh aspek yang menjadi temuan dan catatan kaki oleh BPK-RI dari tahun-tahun pemeriksaan sebelumnya. Penelitian Kusuma menemukan bahwa strategi yang dilakukan Pemerintah Daerah Kota Salatiga dalam mempertahankan opini WTP yaitu komitmen pimpinan beserta bawahan sebagai komponen utama dan peningkatan pengelolaan barang milik daerah dan piutang serta meningkatkan kualitas sumber daya dan membentuk tim penyusun laporan keuangan,

meningkatkan teknologi informasi dan yang terakhir meningkatkan peran inspektorat sebagai auditor internal. (Kusuma Isbi Rahmadani, 2019).

1.4 Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Penulis melakukan penelitian yang berbeda yang dilakukan oleh peneliti terdahulu, dimana Penelitian sebelumnya membahas pencapaian Opini WTP namun penelitian sekarang focus membahas strategi mempertahankan opini WTP. Penelitian sebelumnya oleh Kusuma fokus pada laporan keuangan yang berbasis akrual namun penelitian sekarang fokus membahas mengenai mempertahankan opini WTP dimasa pandemic covid

1.5 Tujuan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh.

II. METODE

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Selanjutnya peneliti mengumpulkan, mengklasifikasikan serta menganalisis data yang berkaitan terhadap masalah yang dihadapi lapangan serta membandingkan pengetahuan teknis terhadap keadaan yang sesungguhnya, guna dapat menarik suatu kesimpulan. Penulis mengumpulkan data melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Adapun analisisnya menggunakan teori SWOT oleh Rangkuti (Rangkuti, 2016) yang menyatakan bahwa analisis SWOT merupakan suatu identifikasi faktor strategis secara sistematis untuk merumuskan strategi.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam menganalisis Strategi Strategi Badan Pengelola Keuangan Daerah (BPKD) Dalam Mempertahankan Opini Wajar Tanpa Pengecualian Pada Masa Pandemi Covid-19 Di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh. Penulis menggunakan teori analisis SWOT menurut Rangkuti adapun variabel-variabel dari model strategi ini adalah kekuatan (strength), Kelemahan (weakness), Peluang (opportunities) dan Ancaman (threats). (Rangkuti, 2016).

3.1 Strengths (kekuatan)

Kekuatan (strength) yang dimiliki oleh Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan berupa adanya kebijakan pemerintah yang melandasi dasar kinerja mengenai tugas pokok, fungsi dan kewenangan masing-masing aparatur yang tertuang dalam Qanun Kabupaten Aceh Selatan Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Selatan, sehingga memberikan

kejelasan kepada masing-masing aparatur dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sehingga tidak terjadi kemungkinan tumpang tindih antar jabatan serta terbentuknya Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan dan komitmen dari pimpinan dan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK atas LHP.

3.2 Weakness (Kelemahan)

Faktor kelemahan yaitu yang pertama kuantitas sumber daya aparatur dan Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang akuntansi atau yang sesuai belum memadai di BPKD Kabupaten Aceh Selatan, Sistem Pengendalian Intern belum memadai, Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah belum memadai dan Pengelolaan asset daerah yang belum optimal. Berdasarkan hal-hal tersebut kelemahan berkaitan strategi BPKD dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh belum baik.

3.3 Opportunities (Peluang)

Beberapa faktor yang menjadi peluang Badan Pengelola Keuangan Daerah dalam mempertahankan opini WTP dan dalam mempertahankan kualitas laporan keuangan daerah yaitu Adanya program dari pimpinan untuk mengembangkan Sumber Daya Manusia sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi, adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh *stakeholder* dan pimpinan masing-masing OPD dalam menyerahkan laporan keuangan tiap-tiap OPD, berkembangnya teknologi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang semakin canggih dan dana Intensif daerah yang didapatkan dari perolehan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada tahun sebelumnya yang digunakan untuk mengembangkan sarana prasarana.

3.4 Threats (Ancaman)

Badan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan, peneliti menemukan beberapa faktor yang menjadi ancaman diantaranya belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh OPD karena laporan tersebut diserahkan secara manual (tidak secara online) oleh masing-masing OPD sehingga terjadinya keterlambatan penyerahan laporan keuangan OPD itu sendiri, banyaknya jumlah OPD dan adanya tuntutan penyelenggaraan pengelolaan keuangan daerah yang transparan dan akuntabel dari pihak pemeriksa ekstern dan lembaga KPK. Uraian tersebut menjelaskan bahwa ancaman berkaitan dengan strategi BPKD dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan Provinsi Aceh sudah baik.

Tabel 2.

Matriks Analisis SWOT Analisis Internal dan Eksternal

Faktor internal	Kekuatan (Strenght)	Kelemahan (Weakness)
Faktor Eksternal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. 2. Adanya komitmen dari pimpinan dan kepala daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK. 3. Adanya analisis kebenaran dan percepatan data dengan melakukan rekonsiliasi antar bidang BPKD Kabupaten Aceh Selatan. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kapabilitas Sumber Daya Manusia dengan latar belakang akuntansi atau yang sesuai belum memadai di BPKD Kabupaten Aceh Selatan. 2. Sistem Pengendalian Intern belum memadai. 3. Penerapan aplikasi sistem informasi keuangan daerah belum memadai. 4. Pengelolaan aset daerah yang belum optimal.
	Peluang (Opportunity)	Strategi S-O
<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya program dari pimpinan untuk mengembangkan SDM sesuai dengan kebutuhan bidang tugas dan fungsi. 2. Adanya komitmen dan kerjasama dari seluruh <i>stakeholder</i> dan pimpinan masing-masing OPD dalam menyerahkan laporan keuangan tiap-tiap OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mensosialisasikan Peraturan Bupati Kabupaten Aceh Selatan No 21 tahun 2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Aceh Selatan. 2. Mendayagunakan komitmen dari setiap OPD untuk taat waktu dalam penyerahan laporan keuangan OPD 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mendayagunakan DID dalam pengembangan sarana dan prasarana untuk penerapan SIMDA dan SIPD . 2. Pemanfaatan program pimpinan untuk mengembangkan SDM yang handal dalam bidang akuntansi. 3. Pemanfaatan perkembangan teknologi untuk pengelolaan aset yang

<p>3. Berkembangnya teknologi penggunaan peralatan dan perlengkapan kantor yang semakin canggih.</p> <p>4. Didapatnya DID dari perolehan opini WTP pada tahun sebelumnya</p>		<p>lebih optimal dan lebih baik.</p>
<p>Ancaman (Threat)</p>	<p>Strategi S-T</p>	<p>Strategi W-T</p>
<p>1. Belum efisiennya penyerahan Laporan Keuangan oleh OPD karena masih terjadinya keterlambatan.</p> <p>2. Banyaknya jumlah OPD</p>	<p>1. Meningkatkan efektivitas tindak lanjut atas rekomendasi dari BPK melalui kegiatan rekonsoliasi antar bidang</p> <p>2. Meningkatkan komitmen koordinasi setiap OPD</p>	<p>1. Menciptakan produk hukum sebagai acuan sistem pengendalian intern.</p>

Sumber: Hasil pengelolaan data riset 2021

3.5 Disikusi dan Temuan Utama Penelitian

Berdasarkan dalam pelaksanaannya, masih terdapat kendala dalam untuk meningkatkan kualitas Laporan Keuangan Daerah (LKPD). Kendala yang sangat berpengaruh adalah Sumber Daya Manusia (SDM). Kompetensi dari sumber daya manusia menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD). Sumber Daya Manusia yang ada di BPKD Kabupaten Aceh Selatan masih belum memadai baik dari segi kualitas maupun kuantitas. Minimnya jumlah pegawai BPKD sangat berpengaruh terhadap penyusunan LKPD. Selain itu, juga masih minimnya pegawai BPKD Aceh Selatan yang handal dan berlatar belakang akuntansi sehingga hal ini membuat penyusunan LKPD di BPKD Kabupaten Aceh Selatan masih belum optimal.

IV. KESIMPULAN

Berdasarkan pada penelitian yang dilaksanakan penulis Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan bahwa strategi BPKD dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan sudah baik. Upaya yang dilakukan BPKD dalam rangka mempertahankan opini wajar tanpa pengecualian

pada masa pandemi covid-19 di Kabupaten Aceh Selatan yaitu melakukan pelatihan mengenai akuntansi untuk meningkatkan kompetensi SDM , peningkatan sarana dan prasarana BPKD, Implementasi dan Pengembangan SIKD dan Koreksi kesalahan dan perbaikan salah saji pada LKPD.

Ketebatasan Penelitian. Penelitian ini hanya tebatas pada periode waktu dan tebatas hanya di Kabupaten Aceh Selatan di Provinsi Aceh. Penelitian hanya terbatas karna mengingat Pandemi Covid-19 merupakan pandemi yang baru ada sejak tahun 2019.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Untuk penelitian selanjutnya agar dapat menggunakan periode waktu yang lebih panjang, dan dapat menambahkan beberapa kabupaten/kota untuk dijadikan sampel sehingga penelitian akan lebih valid.

V. UCAPAN TERIMAKASIH

Ucapan terimakasih terutama diajukan kepada Kepala Badan Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Selatan beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang telah membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

Azwardi. 2018. *Metode Penelitian*. Banda Aceh: Syiah Kuala University Press

Hardani. 2020. *Metode Penelitian Kualitatif dan Kuantitatif* Yogyakarta : Pustaka Ilmu

Hery. 2018. *Manajemen Strategik*. Jakarta: PT Grasindo

<http://www.aceh.bpkgo.id>. Pemeriksaan Laporan Keuangan.Jumat, 27 Agustus 2021.

<http://www.portal.acehselatankab.go.id>. Aceh Selatan Raih WTP ke-6 Dari BPK-RI Perwakilan Aceh.Jumat, 27 Agustus 2021.

<https://acehselatankab.bps.go.id/dynamictable/2020/03/05/22indeks-pembangunan-manusia-kabupaten-aceh-selatan-tahun-2010-2019>.Senin 7 Maret 2022

Lawrence, NeumanW. 2016 . *Metodologi Penelitian Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif* . Jakarta : Indeks

Mardiasmo. 2018. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : AndiYogyakarta

Novianto, Efri. 2019. *Manajemen Strategis*. Yogyakarta: CV BudiUtama

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Negara

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan

Rachmawati, Imami Nur. 2007. Pengumpulan Data Dalam Penelitian Kualitatif Wawancara

Rangkuti, Freddy. 2016. *Analisis SWOT : Teknik Membedah Kasus Bisnis*. Jakarta : PT. Gramedia Pustakka Utama

Septiana, Aldila. 2019. *Analisis Laporan Keuangan Konsep Dasar dan Deskripsi Laporan Keuangan*. Pamekasan : Duta Media Publishing

Simangunsong, Fernandes. 2017. *Metodologi penelitian Pemerintahan*. Bandung:Alfabet

Sinurat, Marja. 2018. *Akuntansi Keuangan Daerah*. Bogor: Ghalia Indonesia

Sugiyono. 2019. *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang keuangan Negara

